



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, perlu dijabarkan dan ditindak lanjuti untuk Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/SR.140 /8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/ 4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompokkani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);

26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
27. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh pelaksana subsidi pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
19. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

22. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.
25. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.
26. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dan masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
27. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
28. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
29. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.

BAB II

PERUNTUKKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) kabupaten/kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2013.

Pasal 5

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- (4) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh kelompok tani atau Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 13

- (1) KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KPPP kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,



NURDIN LUBIS

LAMPIRAN 1 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK

(Ton)

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	124,000	36,362	41,238	117,933	39,674
2.	Perkebunan	13,900	6,330	2,457	8,767	892
3.	Peternakan	410	60	105	-	123
4.	Perikanan Budidaya	690	748	-	-	411
JUMLAH		139,000	43,500	43,800	126,700	41,100

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 2 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN / KOTA

NO.	KABUPATEN/ KOTA	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Medan	547	87	107	291	223
2	Binjai	715	328	416	997	219
3	Tebing Tinggi	311	306	298	406	97
4	Pematang Siantar	619	1,281	813	1,659	288
5	Tanjung Balai	300	41	153	205	47
6	Nias Barat	416	32	31	67	65
7	Padangsidempuan	926	1,124	396	875	248
8	Deli Serdang	15,752	4,394	3,818	11,712	2,393
9	Langkat	11,679	3,761	3,119	8,585	2,480
10	Simalungun	18,035	6,254	4,495	17,715	3,699
11	Karo	16,980	5,786	7,245	14,110	10,106
12	Dairi	8,023	2,335	2,702	8,788	4,480
13	Asahan	4,907	755	2,172	7,919	1,088
14	Labuhan Batu	2,293	313	611	1,361	773
15	Tapanuli Selatan	3,915	399	1,002	4,088	1,385
16	Tapanuli Tengah	1,458	250	237	1,312	428
17	Tapanuli Utara	3,482	1,127	1,197	5,129	1,571
18	Nias	975	50	46	460	138
19	Mandailing Natal	4,107	259	436	1,657	1,090
20	Toba Samosir	3,165	1,215	1,012	3,968	1,139
21	Serdang Bedagai	14,627	6,144	6,122	11,729	2,909
22	Humbang Hasundutan	1,475	524	674	1,361	787
23	Pakpak Bharat	798	105	284	641	756
24	Samosir	1,497	110	665	1,090	545
25	Nias Selatan	959	47	84	131	139
26	Batubara	5,011	1,331	2,742	6,450	665
27	Padang Lawas	3,699	1,032	850	5,948	909
28	Padang Lawas Utara	3,848	565	966	4,106	1,095
29	Labuhan Batu Selatan	5,023	3,017	291	2,286	529
30	Labuhan Batu Utara	2,330	418	758	1,513	709
31	Gunung Sitoli	531	44	29	66	48
32	Nias Utara	597	66	29	75	52
JUMLAH		139,000	43,500	43,800	126,700	41,100

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

RENCANA ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 MENURUT JENIS PUPUK, SUB SEKTOR DAN SEBARAN BULAN

A. PUPUK UREA : (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	124,000	7,904	8,542	8,033	10,532	11,414	9,120	8,744	9,633	13,905	13,756	13,321	9,096
2. Perkebunan	13,900	1,036	1,041	1,083	1,116	1,136	1,172	1,195	1,215	1,322	1,220	1,194	1,170
3. Peternakan	410	31	33	30	29	32	33	32	36	35	39	39	41
4. Perikanan Budidaya	690	76	69	50	31	48	38	52	48	53	70	74	81
JUMLAH	139,000	9,047	9,685	9,196	11,708	12,630	10,363	10,023	10,932	15,315	15,085	14,628	10,388

B. PUPUK SP - 36 :

Sub Sektor	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	36,362	2,486	2,405	2,562	3,017	3,593	2,501	1,910	2,513	3,919	4,101	4,257	3,098
2. Perkebunan	6,330	509	511	517	531	520	526	532	552	530	532	540	530
3. Peternakan	60	3	6	6	2	3	6	4	8	6	6	5	5
4. Perikanan Budidaya	748	83	69	54	42	53	46	53	52	57	71	78	90
JUMLAH	43,500	3,081	2,991	3,139	3,592	4,169	3,079	2,499	3,125	4,512	4,710	4,880	3,723

C. PUPUK ZA :

Sub Sektor	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	41,238	2,376	2,371	2,427	3,968	3,811	3,414	3,191	2,735	4,102	5,067	4,788	2,988
2. Perkebunan	2,457	173	173	188	193	196	204	212	216	217	225	232	228
3. Peternakan	105	11	3	4	8	7	9	14	18	5	8	7	11
JUMLAH	43,800	2,560	2,547	2,619	4,169	4,014	3,627	3,417	2,969	4,324	5,300	5,027	3,227

D. PUPUK NPK : (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	117,933	6,461	6,634	7,125	10,639	11,132	10,015	8,440	8,662	12,144	14,237	13,144	9,300
2. Perkebunan	8,767	732	728	732	729	731	728	731	732	731	731	731	731
JUMLAH	126,700	7,193	7,362	7,857	11,368	11,863	10,743	9,171	9,394	12,875	14,968	13,875	10,031

E. PUPUK ORGANIK : (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	39,674	2,656	2,697	3,334	3,262	3,106	2,450	2,632	3,245	4,805	4,591	4,224	2,672
2. Perkebunan	892	66	66	72	75	75	77	77	77	77	77	76	77
3. Peternakan	123	4	8	7	16	15	20	12	18	17	2	2	2
4. Perikanan Budidaya	411	50	36	25	20	28	22	28	29	32	46	44	51
JUMLAH	41,100	2,776	2,807	3,438	3,373	3,224	2,569	2,749	3,369	4,931	4,716	4,346	2,802

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.1. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2013
 TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	547	11	10	8	21	87	86	18	19	20	105	134	28
2.	Binjai	715	31	25	19	62	79	83	30	30	62	135	123	36
3.	Tebing Tinggi	311	33	9	3	1	39	65	45	5	5	6	50	50
4.	Pematang Siantar	619	14	26	25	75	73	68	39	38	66	74	69	52
5.	Tanjung Balai	300	5	5	6	26	46	44	16	16	17	48	55	16
6.	Nias Barat	416	46	37	38	17	17	17	17	38	33	50	53	53
7.	Padangsidempuan	926	40	42	50	86	86	91	82	76	132	79	82	80
8.	Deli Serdang	15,752	248	265	527	690	1,695	1,597	2,053	1,095	1,020	3,263	2,556	743
9.	Langkat	11,679	2,364	2,249	725	508	849	874	898	1,074	823	553	452	310
10.	Simalungun	18,035	942	1,684	1,779	2,282	1,670	990	1,148	1,235	1,927	1,377	1,274	1,727
11.	Karo	16,980	1,027	1,045	1,813	1,194	978	975	1,091	1,631	2,458	1,732	1,514	1,522
12.	Dairi	8,023	722	781	567	620	461	458	740	1,144	967	892	356	315
13.	Asahan	4,907	350	310	318	640	573	242	215	255	522	713	628	141
14.	Labuhan Batu	2,293	50	51	29	102	106	130	54	97	455	536	644	39
15.	Tapanuli Selatan	3,915	440	377	360	290	222	195	255	455	468	258	328	267
16.	Tapanuli Tengah	1,458	23	41	43	144	158	157	199	187	214	93	104	95
17.	Tapanuli Utara	3,482	128	162	122	382	253	190	196	282	401	321	396	649
18.	Nias	975	39	39	88	126	74	75	82	83	79	95	97	98
19.	Mandailing Natal	4,107	154	114	316	669	586	138	170	601	793	146	180	240
20.	Toba Samosir	3,165	246	308	214	365	291	121	161	278	222	269	361	329
21.	Serdang Bedagai	14,627	428	483	496	1,667	2,218	1,932	788	423	2,010	1,382	1,811	989
22.	Humbang Hasundutan	1,475	81	152	105	51	80	67	130	173	117	45	164	310
23.	Pakpak Bharat	798	22	33	57	115	84	52	45	56	57	123	107	47
24.	Samosir	1,497	82	89	88	185	152	112	105	147	140	152	128	117
25.	Nias Selatan	959	42	42	43	89	109	88	88	74	107	98	91	88
26.	Batubara	5,011	216	217	218	219	654	275	247	328	411	578	893	755
27.	Padang Lawas	3,699	341	277	314	224	131	414	346	245	424	462	261	260
28.	Padang Lawas Utara	3,848	342	258	300	290	295	234	262	247	383	334	486	417
29.	Labuhan Batu Selatan	5,023	373	356	346	378	382	391	361	379	552	553	605	347
30.	Labuhan Batu Utara	2,330	111	91	81	135	138	154	98	128	337	461	473	123
31.	Gunung Sitoli	531	59	48	47	22	21	22	21	48	42	64	68	69
32.	Nias Utara	597	37	59	51	33	23	26	23	45	51	88	85	76
	JUMLAH	139,000	9,047	9,685	9,196	11,708	12,630	10,363	10,023	10,932	15,315	15,085	14,628	10,388

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.2. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	520	9	8	7	20	85	85	16	16	17	102	131	24
2.	Binjai	700	30	24	18	62	79	82	29	28	60	133	121	34
3.	Tebing Tinggi	303	32	9	3	1	38	65	44	4	4	5	49	49
4.	Pematang Siantar	602	12	24	24	74	72	67	38	37	65	72	67	50
5.	Tanjung Balai	285	4	4	5	26	45	44	15	14	15	46	53	14
6.	Nias Barat	400	44	36	36	16	16	16	16	36	32	48	52	52
7.	Padangsidempuan	910	39	41	48	86	84	91	80	75	130	78	80	78
8.	Deli Serdang	14,860	187	201	465	629	1,630	1,522	1,972	1,014	931	3,180	2,472	657
9.	Langkat	10,435	2,260	2,147	626	411	746	771	794	971	714	446	344	205
10.	Simalungun	17,527	898	1,641	1,739	2,246	1,627	950	1,109	1,192	1,879	1,331	1,232	1,683
11.	Karo	16,900	1,019	1,039	1,808	1,187	972	969	1,084	1,624	2,450	1,726	1,506	1,516
12.	Dairi	7,992	720	779	565	618	458	456	737	1,141	962	889	353	314
13.	Asahan	4,087	296	255	254	578	510	173	141	181	442	638	553	66
14.	Labuhan Batu	1,920	25	27	6	75	78	98	22	64	414	500	609	2
15.	Tapanuli Selatan	3,842	437	372	356	285	217	189	250	448	458	250	321	259
16.	Tapanuli Tengah	1,377	19	37	38	140	152	151	193	178	205	84	95	85
17.	Tapanuli Utara	3,380	122	156	115	374	245	181	187	272	389	312	387	640
18.	Nias	882	32	32	81	119	66	67	74	75	71	87	89	89
19.	Mandailing Natal	3,352	101	62	265	612	529	77	108	535	724	74	102	163
20.	Toba Samosir	3,101	243	305	211	362	285	116	156	271	214	261	354	323
21.	Serdang Bedagai	11,592	189	245	259	1,416	1,966	1,677	530	167	1,734	1,123	1,552	734
22.	Humbang Hasundutan	1,414	78	149	102	47	75	63	124	167	107	40	158	304
23.	Pakpak Bharat	749	20	30	54	113	80	48	41	50	49	117	103	44
24.	Samosir	1,480	81	88	87	185	151	111	103	146	138	149	126	115
25.	Nias Selatan	920	41	40	40	87	106	85	84	70	101	94	87	85
26.	Batubara	4,843	206	206	206	206	641	262	230	311	391	560	880	744
27.	Padang Lawas	3,202	308	244	267	187	94	372	304	203	374	419	213	217
28.	Padang Lawas Utara	3,100	290	204	243	232	233	171	195	180	311	264	423	354
29.	Labuhan Batu Selatan	836	30	13	4	31	35	44	9	27	182	200	257	4
30.	Labuhan Batu Utara	1,385	39	20	4	54	56	71	16	46	250	379	400	50
31.	Gunung Sitoli	524	58	47	47	21	21	21	21	47	42	63	68	68
32.	Nias Utara	580	35	57	50	32	22	25	22	43	50	86	84	74
	JUMLAH	124,000	7,904	8,542	8,033	10,532	11,414	9,120	8,744	9,633	13,905	13,756	13,321	9,096

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.3. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(Ton)

Sub Sektor : Perkebunan

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Padangsidempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Deli Serdang	803	50	55	55	56	60	70	75	75	82	75	75	75
9.	Langkat	1,120	90	90	90	90	95	95	95	95	100	95	95	90
10.	Simalungun	384	30	30	30	30	32	32	30	35	40	35	30	30
11.	Karo	33	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2
12.	Dairi	12	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	1	-
13.	Asahan	771	50	50	60	60	60	65	70	70	76	70	70	70
14.	Labuhan Batu	327	20	20	20	25	25	28	28	30	38	31	30	32
15.	Tapanuli Selatan	31	1	1	1	2	2	3	3	3	6	3	3	3
16.	Tapanuli Tengah	58	2	2	3	3	4	4	5	8	8	6	6	7
17.	Tapanuli Utara	78	4	4	5	6	6	7	7	8	10	7	7	7
18.	Nias	78	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
19.	Mandailing Natal	733	50	50	50	55	55	60	60	65	68	70	75	75
20.	Toba Samosir	38	2	2	2	2	3	3	3	4	6	4	4	3
21.	Serdang Bedagai	2,942	230	230	230	245	245	250	250	250	267	250	250	245
22.	Humbang Hasundutan	43	2	2	2	3	3	3	4	4	8	4	4	4
23.	Pakpak Bharat	25	0	0	1	1	2	2	2	4	6	4	2	1
24.	Samosir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Nias Selatan	18	0	0	1	1	1	2	2	2	4	2	2	1
26.	Batubara	143	8	8	10	12	12	12	15	15	18	15	10	8
27.	Padang Lawas	468	30	30	45	35	35	40	40	40	48	40	45	40
28.	Padang Lawas Utara	717	50	50	55	55	60	60	65	65	70	67	60	60
29.	Labuhan Batu Selatan	4,158	340	340	340	345	345	345	350	350	368	350	345	340
30.	Labuhan Batu Utara	920	70	70	75	80	80	80	80	80	85	80	70	70
31.	Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Nias Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		13,900	1,036	1,041	1,083	1,116	1,136	1,172	1,195	1,215	1,322	1,220	1,194	1,170

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.4. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	Aprit	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
2.	Binjai	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3.	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tanjung Balai	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
6.	Nias Barat	6	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
7.	Padangsidempuan	6	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
8.	Deli Serdang	30	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3
9.	Langkat	30	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3
10.	Simalungun	30	3	4	3	1	4	2	2	3	1	2	2	3
11.	Karo	30	4	2	2	3	2	2	3	3	3	1	3	2
12.	Dairi	7	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
13.	Asahan	21	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
14.	Labuhan Batu	18	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2
15.	Tapanuli Selatan	25	0	2	2	2	2	2	1	3	3	3	2	3
16.	Tapanuli Tengah	6	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
17.	Tapanuli Utara	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	Nias	5	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
19.	Mandailing Natal	5	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
20.	Toba Samosir	14	0	0	0	0	2	1	1	2	1	3	2	2
21.	Serdang Bedagai	28	1	2	2	2	3	2	3	2	4	3	2	2
22.	Humbang Hasundutan	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
23.	Pakpak Bharat	13	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24.	Samosir	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1
25.	Nias Selatan	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	Batubara	20	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
27.	Padang Lawas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Padang Lawas Utara	15	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
29.	Labuhan Batu Selatan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	Labuhan Batu Utara	11	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1
31.	Gunung Sitoli	7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
32.	Nias Utara	7	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	JUMLAH	410	31	33	30	29	32	33	32	36	35	39	39	41

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.5. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	22	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3
2.	Binjai	10	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
3.	Tebing Tinggi	8	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
4.	Pematang Siantar	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
5.	Tanjung Balai	10	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
6.	Nias Barat	10	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
7.	Padangsidempuan	10	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
8.	Deli Serdang	59	7	6	4	3	3	3	4	4	5	6	6	8
9.	Langkat	94	11	9	7	4	6	6	7	6	7	9	10	12
10.	Simalungun	94	11	9	7	5	7	6	7	5	7	9	10	11
11.	Karo	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
12.	Dairi	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Asahan	28	3	3	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3
14.	Labuhan Batu	28	3	3	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3
15.	Tapanuli Selatan	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
16.	Tapanuli Tengah	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
17.	Tapanuli Utara	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	Nias	10	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
19.	Mandailing Natal	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
20.	Toba Samosir	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	Serdang Bedagai	65	8	6	5	4	4	3	5	4	5	6	7	8
22.	Humbang Hasundutan	10	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
23.	Pakpak Bharat	11	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
24.	Samosir	11	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	Nias Selatan	10	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
26.	Batubara	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
27.	Padang Lawas	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
28.	Padang Lawas Utara	16	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
29.	Labuhan Batu Selatan	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
30.	Labuhan Batu Utara	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
31.	Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Nias Utara	10	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH	690	76	69	50	31	48	38	52	48	53	70	74	81

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.6. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	87	6	6	2	5	12	12	4	5	2	12	15	6
2.	Binjai	328	22	16	6	10	49	57	10	10	22	74	42	10
3.	Tebing Tinggi	306	86	24	7	1	14	60	37	7	8	7	20	35
4.	Pematang Siantar	1,281	68	46	66	141	152	123	66	40	131	233	129	86
5.	Tanjung Balai	41	3	3	1	1	6	6	2	1	1	8	7	2
6.	Nias Barat	32	3	3	2	1	1	2	2	1	2	5	5	5
7.	Padangsidempuan	1,124	140	98	78	93	98	57	52	80	101	110	105	112
8.	Deli Serdang	4,394	105	152	337	334	790	304	107	115	348	493	930	379
9.	Langkat	3,761	215	226	185	243	441	309	260	315	402	422	487	256
10.	Simalungun	6,254	613	583	566	507	523	371	413	476	457	678	594	473
11.	Karo	5,786	332	318	645	681	260	191	317	527	979	562	485	489
12.	Dairi	2,335	214	262	193	172	119	123	212	352	278	232	99	79
13.	Asahan	755	74	89	65	59	52	53	64	67	47	60	70	55
14.	Labuhan Batu	313	7	7	2	9	11	8	2	8	75	83	62	39
15.	Tapanuli Selatan	399	52	44	43	31	23	3	22	46	45	31	38	21
16.	Tapanuli Tengah	250	9	11	11	20	24	23	35	30	38	14	17	18
17.	Tapanuli Utara	1,127	58	76	50	133	37	30	48	109	112	66	67	341
18.	Nias	50	2	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5
19.	Mandailing Natal	259	12	7	22	35	33	3	7	36	46	33	14	11
20.	Toba Samosir	1,215	125	156	111	110	68	42	54	100	81	97	145	126
21.	Serdang Bedagai	6,144	323	236	218	519	945	717	201	212	663	829	773	508
22.	Humbang Hasundutan	524	48	60	50	15	25	11	46	60	23	14	52	120
23.	Pakpak Bharat	105	6	10	11	7	6	9	10	8	7	11	10	10
24.	Samosir	110	13	7	2	8	9	7	7	8	7	9	11	22
25.	Nias Selatan	47	3	2	3	4	4	3	3	5	6	7	4	3
26.	Batubara	1,331	147	161	75	53	81	137	114	114	123	64	131	131
27.	Padang Lawas	1,032	93	90	91	78	69	93	87	79	93	99	80	80
28.	Padang Lawas Utara	565	37	38	42	55	52	53	62	50	44	45	46	41
29.	Labuhan Batu Selatan	3,017	235	239	240	243	242	242	244	242	275	280	293	242
30.	Labuhan Batu Utara	418	21	8	2	13	14	17	1	12	82	114	131	3
31.	Gunung Sitoli	44	4	4	3	2	2	4	2	2	3	6	6	6
32.	Nias Utara	66	5	5	5	4	3	5	4	4	6	8	8	9
	JUMLAH	43,500	3,081	2,991	3,139	3,592	4,169	3,079	2,499	3,125	4,512	4,710	4,880	3,723

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.7. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	70	4	4	1	4	11	11	3	4	1	10	13	4
2.	Binjai	317	21	15	5	10	48	56	9	9	21	73	41	9
3.	Tebing Tinggi	295	85	23	6	1	13	59	36	6	7	6	19	34
4.	Pematang Siantar	1,269	67	45	65	140	151	122	65	39	130	232	128	85
5.	Tanjung Balai	36	2	2	1	1	6	6	2	1	1	7	6	1
6.	Nias Barat	26	2	2	2	1	1	2	1	1	2	4	4	4
7.	Padangsidempuan	1,115	139	97	77	93	97	57	51	80	100	109	104	111
8.	Deli Serdang	4,048	76	125	312	310	765	277	78	78	319	463	898	347
9.	Langkat	3,434	188	201	164	223	420	286	236	277	374	391	454	220
10.	Simalungun	5,366	539	510	493	437	449	300	340	404	384	601	517	392
11.	Karo	5,699	325	311	638	673	254	184	309	520	973	555	475	482
12.	Dairi	2,309	212	259	191	170	117	121	209	350	276	230	97	77
13.	Asahan	734	71	87	64	58	51	51	63	65	46	57	68	53
14.	Labuhan Batu	296	5	5	1	8	10	7	1	7	73	82	60	37
15.	Tapanuli Selatan	379	50	42	42	30	22	2	21	44	44	28	35	19
16.	Tapanuli Tengah	234	6	10	10	19	23	22	34	29	36	13	16	16
17.	Tapanuli Utara	1,113	57	75	48	132	36	29	47	108	111	65	65	340
18.	Nias	47	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
19.	Mandailing Natal	243	10	6	21	34	31	2	6	35	44	32	13	9
20.	Toba Samosir	1,161	122	153	107	103	64	38	48	96	77	92	139	122
21.	Serdang Bedagai	4,905	217	132	115	419	843	615	99	111	561	725	668	400
22.	Humbang Hasundutan	495	45	57	48	12	23	8	44	58	21	12	50	117
23.	Pakpak Bharat	48	2	6	7	2	2	5	5	2	2	5	5	5
24.	Samosir	100	12	6	1	8	8	7	6	7	6	8	10	21
25.	Nias Selatan	42	3	2	3	4	4	3	3	3	5	5	4	3
26.	Batubara	1,313	145	159	72	52	80	136	113	113	122	63	129	129
27.	Padang Lawas	273	31	27	28	15	5	30	24	15	30	36	16	16
28.	Padang Lawas Utara	279	15	16	19	29	29	30	39	23	21	22	19	17
29.	Labuhan Batu Selatan	208	4	8	8	8	8	8	8	8	40	44	56	8
30.	Labuhan Batu Utara	405	20	7	1	12	13	16	1	11	80	113	130	1
31.	Gunung Sitoli	43	4	4	3	2	2	3	2	2	3	6	6	6
32.	Nias Utara	60	5	5	5	3	3	4	3	3	5	8	8	8
	JUMLAH	36,362	2,486	2,405	2,562	3,017	3,593	2,501	1,910	2,513	3,919	4,101	4,257	3,098

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.9. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nias Barat	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7.	Padangsidempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Deli Serdang	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
9.	Langkat	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
10.	Simalungun	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
11.	Karo	4	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
12.	Dairi	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	Asahan	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
14.	Labuhan Batu	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15.	Tapanuli Selatan	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
16.	Tapanuli Tengah	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
17.	Tapanuli Utara	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18.	Nias	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19.	Mandailing Natal	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
20.	Toba Samosir	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
21.	Serdang Bedagai	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
22.	Humbang Hasundutan	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23.	Pakpak Bharat	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
24.	Samosir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Nias Selatan	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
26.	Batubara	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Padang Lawas	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
28.	Padang Lawas Utara	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29.	Labuhan Batu Selatan	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30.	Labuhan Batu Utara	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
31.	Gunung Sitoli	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32.	Nias Utara	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
JUMLAH		60	3	6	6	2	3	6	4	8	6	6	5	5

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.10. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK SP - 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Perikanan Budidaya

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
2.	Binjai	11	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Tebing Tinggi	11	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Pematang Siantar	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Tanjung Balai	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
6.	Nias Barat	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
7.	Padangsidempuan	9	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
8.	Deli Serdang	74	9	7	5	4	5	4	5	5	6	7	8	9
9.	Langkat	133	14	13	9	8	9	8	9	9	10	13	14	17
10.	Simalungun	134	14	12	10	7	10	8	10	9	10	13	14	17
11.	Karo	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
12.	Dairi	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	Asahan	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
14.	Labuhan Batu	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
15.	Tapanuli Selatan	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
16.	Tapanuli Tengah	14	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
17.	Tapanuli Utara	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	Nias	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Mandailing Natal	14	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
20.	Toba Samosir	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	Serdang Bedagai	96	11	9	7	5	7	6	7	6	7	9	10	12
22.	Humbang Hasundutan	14	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
23.	Pakpak Bharat	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24.	Samosir	10	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
25.	Nias Selatan	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
26.	Batubara	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
27.	Padang Lawas	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
28.	Padang Lawas Utara	15	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
29.	Labuhan Batu Selatan	11	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	Labuhan Batu Utara	11	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
31.	Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Nias Utara	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	JUMLAH	748	83	69	54	42	53	46	53	52	57	71	78	90

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	107	1	1	1	2	22	20	4	4	2	24	23	3
2.	Binjai	416	14	13	19	18	59	59	19	35	26	79	52	23
3.	Tebing Tinggi	298	70	17	2	4	23	72	41	5	5	5	27	27
4.	Pematang Siantar	813	25	46	47	56	59	41	53	37	64	76	260	49
5.	Tanjung Balai	153	6	3	1	3	28	26	6	3	6	42	26	3
6.	Nias Barat	31	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4
7.	Padangsidempuan	396	27	30	24	37	39	22	21	30	39	43	40	44
8.	Deli Serdang	3.818	160	135	185	340	341	281	145	205	212	693	799	322
9.	Langkat	3.119	177	184	167	217	224	288	363	254	337	354	317	237
10.	Simalungun	4.495	418	334	312	539	414	216	198	283	219	683	597	282
11.	Karo	7.245	539	527	551	639	567	565	591	581	716	642	661	666
12.	Dairi	2.702	147	186	235	246	159	142	200	327	375	406	169	110
13.	Asahan	2.172	100	125	124	362	261	148	177	71	197	240	298	69
14.	Labuhan Batu	611	13	17	20	32	33	43	132	41	87	91	89	13
15.	Tapanuli Selatan	1.002	108	103	94	90	56	44	52	109	106	74	99	67
16.	Tapanuli Tengah	237	6	8	8	22	26	23	35	32	34	12	18	13
17.	Tapanuli Utara	1.197	125	141	73	70	74	79	91	75	114	115	119	121
18.	Nias	46	3	2	1	3	4	6	4	5	5	4	5	4
19.	Mandailing Natal	436	19	13	30	58	48	22	28	57	83	31	23	24
20.	Toba Samosir	1.012	98	124	86	89	59	37	47	87	71	81	123	110
21.	Serdang Bedagai	6.122	64	116	144	738	955	782	334	140	940	955	544	410
22.	Humbang Hasundutan	674	53	73	56	34	30	28	63	74	49	29	53	132
23.	Pakpak Bharat	284	21	21	21	16	21	41	28	16	30	31	19	19
24.	Samosir	665	79	45	48	76	31	54	90	29	39	17	86	71
25.	Nias Selatan	84	2	3	6	7	4	3	5	8	10	13	14	9
26.	Batubara	2.742	124	135	177	264	278	294	236	236	250	213	283	252
27.	Padang Lawas	850	88	71	78	44	11	109	101	44	80	117	48	59
28.	Padang Lawas Utara	966	40	33	61	103	129	104	133	103	81	64	73	42
29.	Labuhan Batu Selatan	291	11	13	17	14	13	20	54	21	34	40	40	14
30.	Labuhan Batu Utara	758	16	22	23	40	42	52	162	52	108	114	110	17
31.	Gunung Sitoli	29	2	2	3	2	1	2	1	1	1	4	5	5
32.	Nias Utara	29	2	2	3	2	1	2	1	1	1	4	4	6
	JUMLAH	43,800	2,560	2,547	2,619	4,169	4,014	3,627	3,417	2,969	4,324	5,300	5,027	3,227

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	104	1	1	1	2	22	20	3	3	2	23	23	3
2.	Binjai	413	14	13	19	18	59	59	18	34	26	78	52	23
3.	Tebing Tinggi	298	70	17	2	4	23	72	41	5	5	5	27	27
4.	Pematang Siantar	813	25	46	47	56	59	41	53	37	64	76	260	49
5.	Tanjung Balai	153	6	3	1	3	28	26	6	3	6	42	26	3
6.	Nias Barat	30	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	3
7.	Padangsidempuan	393	27	30	24	37	39	22	20	29	39	42	40	44
8.	Deli Serdang	3,300	125	100	145	300	300	239	101	158	166	643	749	274
9.	Langkat	2,187	106	114	94	143	148	212	282	173	257	274	232	152
10.	Simalungun	4,491	417	334	312	538	414	215	197	283	219	683	597	282
11.	Karo	6,999	524	512	535	621	548	544	570	558	694	617	636	640
12.	Dairi	2,389	127	166	210	221	133	116	172	299	347	377	139	82
13.	Asahan	2,167	99	125	124	362	260	147	177	70	197	239	298	69
14.	Labuhan Batu	607	12	17	19	32	33	43	131	41	87	91	89	12
15.	Tapanuli Selatan	998	108	102	94	90	56	43	52	108	106	74	99	66
16.	Tapanuli Tengah	232	6	8	8	21	25	22	35	31	33	12	18	13
17.	Tapanuli Utara	1,192	124	141	73	69	73	78	91	75	114	114	119	121
18.	Nias	43	3	2	1	3	4	6	4	4	4	4	4	4
19.	Mandailing Natal	281	10	5	20	47	38	8	12	42	68	15	8	8
20.	Toba Samosir	1,009	98	124	86	89	59	37	46	86	70	81	123	110
21.	Serdang Bedagai	6,118	64	115	144	737	955	781	334	140	940	955	543	410
22.	Humbang Hasundutan	353	28	48	31	7	3	1	36	47	21	2	25	104
23.	Pakpak Bharat	279	18	21	21	16	21	41	28	16	30	31	18	18
24.	Samosir	662	79	45	48	76	31	54	90	28	39	17	85	70
25.	Nias Selatan	81	2	3	6	7	4	3	5	6	10	13	13	9
26.	Batubara	2,739	124	134	177	264	278	294	235	235	250	213	283	252
27.	Padang Lawas	848	88	71	77	44	11	109	100	44	80	117	48	59
28.	Padang Lawas Utara	964	40	33	60	103	129	103	133	103	81	64	73	42
29.	Labuhan Batu Selatan	287	10	13	17	13	13	20	54	20	34	40	40	13
30.	Labuhan Batu Utara	752	15	22	23	39	41	52	161	52	108	113	110	16
31.	Gunung Sitoli	28	2	2	3	2	1	2	1	1	1	4	4	5
32.	Nias Utara	28	2	2	3	2	1	2	1	1	1	4	4	5
	JUMLAH	41,238	2,376	2,371	2,427	3,968	3,811	3,414	3,191	2,735	4,102	5,067	4,788	2,988

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Padangsidempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Deli Serdang	513	35	35	40	40	40	42	43	45	45	50	50	48
9.	Langkat	926	70	70	73	73	75	75	80	80	80	80	85	85
10.	Simalungun	0		-			-			-			-	
11.	Karo	240	15	15	15	18	18	20	20	22	22	25	25	25
12.	Dairi	310	20	20	25	25	26	26	27	27	28	28	30	28
13.	Asahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Labuhan Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tapanuli Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tapanuli Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Nias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Mandailing Natal	150	8	8	10	10	10	14	15	15	15	15	15	15
20.	Toba Samosir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Serdang Bedagai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Humbang Hasundutan	318	25	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27
23.	Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Samosir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Nias Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Batubara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Labuhan Batu Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Labuhan Batu Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Nias Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	2,457	173	173	188	193	196	204	212	216	217	225	232	228

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Peternakan

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	(Ton)											
			Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
2.	Binjai	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
3.	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nias Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7.	Padangsidempuan	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
8.	Deli Serdang	5	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0
9.	Langkat	6	1	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	0
10.	Simalungun	4	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
11.	Karo	6	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
12.	Dairi	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
13.	Asahan	5	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
14.	Labuhan Batu	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
15.	Tapanuli Selatan	4	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
16.	Tapanuli Tengah	5	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
17.	Tapanuli Utara	5	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
18.	Nias	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
19.	Mandailing Natal	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
20.	Toba Samosir	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
21.	Serdang Bedagai	4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
22.	Humbang Hasundutan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
23.	Pakpak Bharat	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24.	Samosir	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
25.	Nias Selatan	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
26.	Batubara	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
27.	Padang Lawas	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28.	Padang Lawas Utara	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29.	Labuhan Batu Selatan	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
30.	Labuhan Batu Utara	6	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
31.	Gunung Sitoli	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
32.	Nias Utara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	105	11	3	4	8	7	9	14	18	5	8	7	11

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.15. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2013

TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	291	5	9	2	9	50	55	9	10	3	59	65	15
2.	Binjai	997	53	64	79	75	75	86	84	79	97	113	102	90
3.	Tebing Tinggi	406	65	25	7	12	35	49	46	10	30	36	35	56
4.	Pematang Siantar	1,659	31	193	103	136	144	118	85	106	181	330	134	98
5.	Tanjung Balai	205	6	6	9	22	21	16	17	16	26	29	21	16
6.	Nias Barat	67	6	6	5	2	2	2	3	3	5	11	9	13
7.	Padangsidempuan	875	48	46	61	87	25	43	32	35	84	125	186	103
8.	Deli Serdang	11,712	278	330	512	759	1,849	1,588	454	327	438	2,538	2,122	517
9.	Langkat	8,585	348	345	480	791	1,075	940	569	800	778	949	1,030	480
10.	Simalungun	17,715	777	763	871	1,944	2,026	1,546	2,244	1,513	1,825	1,852	1,464	890
11.	Karo	14,110	1,105	968	1,113	1,031	1,022	1,303	1,055	1,338	1,240	1,493	1,304	1,138
12.	Dairi	8,788	752	642	685	603	504	511	795	1,244	1,067	1,071	510	404
13.	Asahan	7,919	316	363	584	881	878	433	326	384	774	964	1,351	665
14.	Labuhan Batu	1,361	8	13	6	65	65	45	15	52	298	367	402	25
15.	Tapanuli Selatan	4,088	410	635	368	326	205	156	209	456	481	205	423	214
16.	Tapanuli Tengah	1,312	38	58	58	113	125	125	168	154	198	88	99	88
17.	Tapanuli Utara	5,129	252	306	244	614	229	209	284	427	560	379	325	1,300
18.	Nias	460	34	34	37	43	38	38	39	39	38	40	40	40
19.	Mandailing Natal	1,657	89	53	155	296	198	29	54	229	438	60	27	29
20.	Toba Samosir	3,968	359	490	335	376	231	145	177	360	268	323	490	414
21.	Serdang Bedagai	11,729	224	290	321	1,572	1,752	1,441	584	222	1,797	1,620	1,137	769
22.	Humbang Hasundutan	1,361	119	154	122	77	77	76	133	140	105	79	104	175
23.	Pakpak Bharat	641	46	43	43	87	53	56	53	46	46	62	53	53
24.	Samosir	1,090	140	84	89	129	54	89	129	52	67	72	79	106
25.	Nias Selatan	131	6	6	6	11	14	12	11	11	11	19	13	11
26.	Batubara	6,450	391	391	391	446	533	526	507	526	526	526	822	865
27.	Padang Lawas	5,948	670	538	586	362	68	732	613	345	556	736	362	380
28.	Padang Lawas Utara	4,106	428	297	381	323	272	170	203	192	523	363	606	348
29.	Labuhan Batu Selatan	2,286	100	119	82	83	163	124	161	165	268	278	320	423
30.	Labuhan Batu Utara	1,513	76	76	107	89	76	76	106	106	137	159	220	285
31.	Gunung Sitoli	66	6	7	7	2	2	2	3	3	5	10	9	10
32.	Nias Utara	75	7	8	8	2	2	2	3	4	5	12	11	11
	JUMLAH	126,700	7,193	7,362	7,857	11,368	11,863	10,743	9,171	9,394	12,875	14,968	13,875	10,031

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	291	5	9	2	9	50	55	9	10	3	59	65	15
2.	Binjai	997	53	64	79	75	75	86	84	79	97	113	102	90
3.	Tebing Tinggi	406	65	25	7	12	35	49	46	10	30	36	35	56
4.	Pematang Siantar	1,659	31	193	103	136	144	118	85	106	181	330	134	98
5.	Tanjung Balai	205	6	6	9	22	21	16	17	16	26	29	21	16
6.	Nias Barat	67	6	6	5	2	2	2	3	3	5	11	9	13
7.	Padangsidempuan	875	48	46	61	87	25	43	32	35	84	125	186	103
8.	Deli Serdang	10,656	190	242	424	671	1,761	1,500	366	239	350	2,450	2,034	429
9.	Langkat	7,673	272	269	404	715	999	864	493	724	702	873	954	404
10.	Simalungun	16,971	715	701	809	1,882	1,964	1,484	2,182	1,451	1,763	1,790	1,402	828
11.	Karo	13,690	1,070	933	1,078	996	987	1,268	1,020	1,303	1,205	1,458	1,269	1,103
12.	Dairi	7,804	670	560	603	521	422	429	713	1,162	985	989	428	322
13.	Asahan	7,559	286	333	554	851	848	403	296	354	744	934	1,321	635
14.	Labuhan Batu	1,336	5	11	4	63	63	43	13	50	296	365	400	23
15.	Tapanuli Selatan	3,932	397	622	355	313	192	143	196	443	468	192	410	201
16.	Tapanuli Tengah	1,132	23	43	43	98	110	110	153	139	183	73	84	73
17.	Tapanuli Utara	4,097	166	220	158	528	143	123	198	341	474	293	239	1,214
18.	Nias	76	2	2	5	11	6	6	7	7	6	8	8	8
19.	Mandailing Natal	1,393	67	31	133	274	176	7	32	207	416	38	5	7
20.	Toba Samosir	3,791	344	475	320	364	216	130	162	345	253	308	475	399
21.	Serdang Bedagai	10,978	161	230	258	1,508	1,689	1,381	521	159	1,734	1,557	1,074	706
22.	Humbang Hasundutan	653	60	95	63	18	18	17	74	81	46	20	45	116
23.	Pakpak Bharat	497	34	31	31	75	41	44	41	34	34	50	41	41
24.	Samosir	982	131	75	80	120	45	80	120	43	58	63	70	97
25.	Nias Selatan	95	3	3	3	8	11	9	8	8	8	16	10	8
26.	Batubara	6,402	387	387	387	442	529	522	503	522	522	522	818	861
27.	Padang Lawas	5,876	664	532	580	356	62	726	607	339	550	730	356	374
28.	Padang Lawas Utara	4,034	422	291	375	317	266	164	197	186	517	357	600	342
29.	Labuhan Batu Selatan	2,178	91	110	73	74	154	115	152	156	259	269	311	414
30.	Labuhan Batu Utara	1,487	74	74	104	87	74	74	104	103	135	157	218	283
31.	Gunung Sitoli	66	6	7	7	2	2	2	3	3	5	10	9	10
32.	Nias Utara	75	7	8	8	2	2	2	3	4	5	12	11	11
	JUMLAH	117,933	6,461	6,634	7,125	10,639	11,132	10,015	8,440	8,662	12,144	14,237	13,144	9,300

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Perkebunan

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Padangsidempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Deli Serdang	1,056	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
9.	Langkat	912	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
10.	Simalungun	744	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
11.	Karo	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
12.	Dairi	984	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
13.	Asahan	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
14.	Labuhan Batu	25	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15.	Tapanuli Selatan	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
16.	Tapanuli Tengah	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
17.	Tapanuli Utara	1,032	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
18.	Nias	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
19.	Mandailing Natal	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
20.	Toba Samosir	177	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
21.	Serdang Bedagai	751	63	60	63	64	63	60	63	63	63	63	63	63
22.	Humbang Hasundutan	708	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
23.	Pakpak Bharat	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
24.	Samosir	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
25.	Nias Selatan	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26.	Batubara	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27.	Padang Lawas	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
28.	Padang Lawas Utara	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
29.	Labuhan Batu Selatan	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
30.	Labuhan Batu Utara	26	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
31.	Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Nias Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	8,767	732	728	732	729	731	728	731	732	731	731	731	731

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	223	7	8	7	14	28	10	10	11	45	39	30	14
2.	Binjai	219	13	6	6	7	16	27	14	10	33	40	40	7
3.	Tebing Tinggi	97	4	7	4	5	6	10	11	3	21	11	7	8
4.	Pematang Siantar	288	16	27	19	21	18	41	11	7	35	31	17	45
5.	Tanjung Balai	47	3	3	2	2	3	5	2	3	5	9	6	4
6.	Nias Barat	65	3	4	5	4	3	4	4	6	7	9	6	10
7.	Padangsidempuan	248	22	19	10	31	18	14	10	11	10	31	45	27
8.	Deli Serdang	2,393	75	80	59	279	521	89	84	213	268	296	296	166
9.	Langkat	2,480	139	132	106	173	296	242	153	256	258	400	344	249
10.	Simalungun	3,699	328	315	324	345	299	201	380	256	258	400	344	249
11.	Karo	10,106	732	829	1,333	824	501	305	565	1,093	1,621	1,254	627	422
12.	Dairi	4,480	212	318	387	394	292	402	457	493	453	430	351	291
13.	Asahan	1,088	123	116	62	48	68	112	101	100	105	57	118	78
14.	Labuhan Batu	773	17	31	22	39	36	38	29	36	110	116	228	71
15.	Tapanuli Selatan	1,385	210	116	100	108	65	108	96	93	123	124	120	122
16.	Tapanuli Tengah	428	43	42	37	33	27	41	28	24	35	53	26	39
17.	Tapanuli Utara	1,571	59	87	185	95	48	48	98	150	243	86	108	364
18.	Nias	138	8	7	14	14	10	11	12	12	12	13	12	13
19.	Mandailing Natal	1,090	58	31	111	176	153	13	33	171	277	20	20	27
20.	Toba Samosir	1,139	178	135	133	90	81	72	70	71	60	64	68	117
21.	Serdang Bedagai	2,909	87	72	55	252	437	347	39	46	369	580	495	130
22.	Humbang Hasundutan	787	60	109	78	19	17	22	64	95	45	20	77	181
23.	Pakpak Bharat	756	27	32	110	145	32	28	46	111	156	25	28	16
24.	Samosir	545	71	17	36	16	10	17	116	38	34	13	86	91
25.	Nias Selatan	139	11	10	10	11	13	12	13	12	12	11	12	12
26.	Batubara	665	75	71	38	29	42	68	63	61	65	34	72	47
27.	Padang Lawas	909	116	92	99	46	6	103	91	48	83	113	54	58
28.	Padang Lawas Utara	1,095	57	60	59	107	120	118	124	102	87	89	86	86
29.	Labuhan Batu Selatan	529	7	7	11	12	22	22	11	13	124	134	154	12
30.	Labuhan Batu Utara	709	6	16	8	25	28	30	8	25	163	184	209	7
31.	Gunung Sitoli	48	5	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4
32.	Nias Utara	52	4	4	4	5	4	5	3	4	6	5	4	4
	JUMLAH	41,100	2,776	2,807	3,438	3,373	3,224	2,569	2,749	3,369	4,931	4,716	4,346	2,802

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.19. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2013
 TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Tanaman Pangan dan Hortikultura

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	202	5	6	6	12	27	8	9	9	43	37	28	12
2.	Binjai	208	11	5	5	7	15	27	13	8	33	39	39	6
3.	Tebing Tinggi	87	3	6	4	4	6	9	10	3	19	10	6	7
4.	Pematang Siantar	276	15	27	19	21	16	40	10	5	33	30	16	44
5.	Tanjung Balai	39	2	2	2	2	2	5	2	2	4	8	5	3
6.	Nias Barat	59	3	4	4	4	3	4	4	4	6	8	5	10
7.	Padangsidempuan	241	21	19	10	30	18	13	10	10	10	30	44	26
8.	Deli Serdang	2,283	66	72	51	271	511	80	75	39	52	411	586	69
9.	Langkat	2,425	133	127	102	169	291	238	149	210	265	291	291	159
10.	Simalungun	3,555	315	302	313	335	288	190	369	244	245	387	332	235
11.	Karo	10,014	724	821	1,325	817	494	297	557	1,086	1,614	1,246	619	414
12.	Dairi	4,342	201	307	377	382	280	391	446	481	441	418	339	279
13.	Asahan	1,032	118	111	58	44	64	107	96	95	101	52	113	73
14.	Labuhan Batu	743	15	30	19	36	34	34	26	34	107	114	226	68
15.	Tapanuli Selatan	1,329	205	111	96	104	60	103	92	89	118	119	115	117
16.	Tapanuli Tengah	398	41	40	35	30	24	37	26	21	32	51	24	37
17.	Tapanuli Utara	1,448	49	79	175	85	37	38	87	139	232	76	98	353
18.	Nias	72	3	3	9	8	5	5	6	6	6	7	7	7
19.	Mandailing Natal	1,024	53	25	106	172	147	8	27	166	271	14	14	21
20.	Toba Samosir	1,115	177	134	131	87	79	69	69	68	58	62	66	115
21.	Serdang Bedagai	2,877	84	69	53	249	435	345	36	44	367	577	491	127
22.	Humbang Hasundutan	700	53	101	70	12	10	15	57	88	37	13	70	174
23.	Pakpak Bharat	735	26	31	109	143	31	26	43	109	154	23	26	88
24.	Samosir	509	68	14	33	13	7	14	112	36	30	10	84	88
25.	Nias Selatan	111	9	9	9	9	9	9	10	9	10	9	10	9
26.	Batubara	652	74	70	37	28	41	68	61	60	63	33	71	46
27.	Padang Lawas	887	114	90	98	45	4	101	89	45	82	111	52	56
28.	Padang Lawas Utara	1,076	55	58	58	106	119	116	123	100	86	87	84	84
29.	Labuhan Batu Selatan	505	5	5	10	10	20	20	10	10	121	132	152	10
30.	Labuhan Batu Utara	638	-	11	2	19	21	25	2	19	157	178	203	1
31.	Gunung Sitoli	46	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
32.	Nias Utara	46	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
JUMLAH		39,674	2,656	2,697	3,334	3,262	3,106	2,450	2,632	3,245	4,805	4,591	4,224	2,672

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Perkebunan														(Ton)
No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Binjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Padangsidempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Deli Serdang	82	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
9.	Langkat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Simalungun	90	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	7	8
11.	Karo	70	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12.	Dairi	117	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.	Asahan	34	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14.	Labuhan Batu	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	Tapanuli Selatan	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16.	Tapanuli Tengah	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.	Tapanuli Utara	105	8	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
18.	Nias	58	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
19.	Mandailing Natal	44	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
20.	Toba Samosir	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	Serdang Bedagai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Humbang Hasundutan	74	6	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6
23.	Pakpak Bharat	9	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
24.	Samosir	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25.	Nias Selatan	21	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26.	Batubara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Padang Lawas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	Padang Lawas Utara	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	Labuhan Batu Selatan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	Labuhan Batu Utara	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
31.	Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Nias Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	892	66	66	72	75	75	77	77	77	77	77	76	77

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.21. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2013
 TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Peternakan

(Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
2.	Binjai	5	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
3.	Tebing Tinggi	4	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4.	Pematang Siantar	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
5.	Tanjung Balai	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
6.	Nias Barat	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
7.	Padangsidempuan	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
8.	Deli Serdang	5	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
9.	Langkat	9	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
10.	Simalungun	5	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
11.	Karo	5	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
12.	Dairi	4	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
13.	Asahan	5	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
14.	Labuhan Batu	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
15.	Tapanuli Selatan	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
16.	Tapanuli Tengah	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
17.	Tapanuli Utara	4	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0
18.	Nias	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
19.	Mandailing Natal	5	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
20.	Toba Samosir	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
21.	Serdang Bedagai	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
22.	Humbang Hasundutan	4	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
23.	Pakpak Bharat	4	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
24.	Samosir	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
25.	Nias Selatan	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
26.	Batubara	5	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
27.	Padang Lawas	4	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
28.	Padang Lawas Utara	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
29.	Labuhan Batu Selatan	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
30.	Labuhan Batu Utara	3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
31.	Gunung Sitoli	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32.	Nias Utara	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
JUMLAH		123	4	8	7	16	15	20	12	18	17	2	2	2

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN 3.22. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2013
 TANGGAL 30 DESEMBER 2013

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

Sub Sektor : Perikanan Budidaya (Ton)

No.	Kabupaten / Kota	Setahun	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1.	Medan	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
2.	Binjai	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
3.	Tebing Tinggi	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
4.	Pematang Siantar	8	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
5.	Tanjung Balai	6	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
6.	Nias Barat	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
7.	Padangsidempuan	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
8.	Deli Serdang	23	3	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	3
9.	Langkat	46	5	4	3	3	4	3	3	3	3	4	5	6
10.	Simalungun	49	6	5	3	3	3	3	3	3	4	5	5	6
11.	Karo	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
12.	Dairi	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
13.	Asahan	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
14.	Labuhan Batu	17	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2
15.	Tapanuli Selatan	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
16.	Tapanuli Tengah	14	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
17.	Tapanuli Utara	14	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
18.	Nias	5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
19.	Mandailing Natal	17	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
20.	Toba Samosir	11	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
21.	Serdang Bedagai	28	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
22.	Humbang Hasundutan	9	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
23.	Pakpak Bharat	8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1
24.	Samosir	9	1	1	1	0	1	0	2	0	1	1	0	1
25.	Nias Selatan	5	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
26.	Batubara	8	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
27.	Padang Lawas	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
28.	Padang Lawas Utara	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
29.	Labuhan Batu Selatan	8	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1
30.	Labuhan Batu Utara	8	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1
31.	Gunung Sitoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Nias Utara	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
JUMLAH		411	50	36	25	20	28	22	28	29	32	46	44	51

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO